

**IMPLEMENTASI PROGRAM PETANI BANGKIT GUNA MENINGKATKAN
PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN
BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Andri Kusuma Jati

NPP. 29.0385

Asdaf Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Kebijakan Publik

Email: 29.0385@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Petani bangkit program is a policy taken by Banyuasin Regency as the fourth largest rice field nationally. This program aims to increase the income of farmers who are on the border of South Sumatra. **Purpose:** This research assesses the extent to which the implementation of this policy is carried out. **Method:** This is a qualitative research that uses the theory of Weimer and Vining (1999), namely the logic of the policy, the place where the policy is operated and the ability of the implementor as the lens of analysis, which is supplemented by observations and interviews. **Result:** Research findings showed that this policy still faces several challenges, such as the large number of lands that have not been managed optimally, the uncertainty of the distribution of fertilizer assistance from the government and the lack of facilities and infrastructure. **Conclusion:** Government support in terms of program socialization, supervision and maintenance of facilities and infrastructure is needed so that the sustainability of this program can be more optimal for the farmers' income.

Keywords: Implementation; Growing Farmers Program; Farmer Income

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Program petani bangkit merupakan kebijakan yang diambil oleh Kabupaten Banyuasin yang dinyatakan sebagai lumbung pangan keempat terbesar secara nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani yang berada di perbatasan Sumatera Selatan. **Tujuan:** Penelitian bertujuan untuk menganalisis sejauhmana implementasi kebijakan ini dilakukan. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teori Weimer dan Vining (1999), yaitu logika kebijakan, tempat kebijakan dioperasikan dan kemampuan implementor sebagai lensa analisis, serta dilengkapi juga dengan observasi dan wawancara. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan seperti masih banyaknya lahan yang belum dikelola secara maksimal, ketidakpastian pembagian bantuan pupuk dari pemerintah serta belum optimalnya sarana dan prasarana. **Kesimpulan:** Dukungan pemerintah dalam hal sosialisasi program, pengawasan serta pemeliharaan sarana dan prasarana diperlukan agar keberlanjutan program ini dapat lebih optimal.

Kata kunci: Implementasi; Program Petani Bangkit; Pendapatan Petani

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa atau garis ekuator yang membagi bumi bagian selatan dengan bagian utara menjadi dua bagian yang sama besar. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis sehingga mempunyai keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang luar biasa. Keanekaragaman hayati serta kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, membuat negara kepulauan ini dikenal sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang ekonominya dipengaruhi oleh sektor pertanian. Hal tersebut didukung oleh data BPS yang menunjukkan bahwa luas panen padi di Indonesia pada tahun 2019 - 2020. Pada tahun 2019, luas panen padi di Indonesia adalah sebesar 10.677.887,15 hektar. Selanjutnya pada tahun 2020 di Indonesia mengalami penurunan sehingga luas panen menjadi sebesar 10.657.274,96 hektar. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2021, dimana luas panen di Indonesia juga mengalami penurunan sehingga luas panen menjadi sebesar 10.515.323,06 hektar. Dengan luas lahan panen tersebut, sebagian besar penduduknya berpenghasilan dari hasil pertanian maupun bercocok tanam terutama tanaman pangan (Badan Pusat Statistik, 2021) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021), sekitar 131,06 juta jiwa penduduk yang bekerja atau memiliki pekerjaan. Mayoritas kegiatan bidang pertanian dilakukan di daerah pedesaan. Keadaan ini membuat pemerintah menjadikan pembangunan bidang pertanian sehingga menjadi sangat relevan dan strategis untuk peningkatan pendapatan petani. Maka dari itu, pada setiap tahap pembangunan pertanian, tujuan pembangunan selalu berfokus pada kesejahteraan terutama pendapatan petani. Pemerintah telah berupaya meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan pendapatan dan menjaga ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan maupun program sektor pertanian yang telah dibuat demi meningkatkan kesejahteraan petani.

Selama pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan sejauh ini, diyakini telah membawa banyak perubahan terutama dalam peningkatan produksi dan perekonomian nasional di perkotaan dan pedesaan. Tetapi masalah kemiskinan masih belum bisa teratasi, terutama kemiskinan di pedesaan (Ubur, 2012). Masih banyak masyarakat Indonesia yang miskin dan mayoritas yang tergolong miskin tersebut tinggal di pedesaan. Data BPS (2020), sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Dan sebagian besar, yaitu 15,51 juta jiwa atau 56,30% berada di pedesaan dan sebesar 12,04 juta jiwa atau 44,70% penduduk miskin berada di perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2020)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional adalah sebesar 13,70% terbesar kedua setelah sektor industri yang menyumbang sebesar 19,88% (Prakoso, 2021). Sektor pertanian telah berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyuasin.

Kabupaten Banyuasin merupakan wilayah yang terletak di sebelah selatan Kota Palembang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi. Kabupaten Banyuasin juga merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Hal tersebut menjadikan sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Kondisi tersebut membuat Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu daerah penyangga Sumatera Selatan terutama pada pemenuhan kebutuhan pangan. Meski tergolong kabupaten baru, Kabupaten Banyuasin sudah berhasil menjadi produsen beras ke-4 secara nasional (Amanda, 2021).

Dibandingkan dengan daerah lain Kabupaten Banyuasin memiliki luas panen terbesar kedua yaitu sebesar 211.187 hektar setelah Kabupaten Indramayu sebesar 226.626 hektar. Tetapi jumlah produksi beras Kabupaten Banyuasin hanya mampu menempati urutan ke-4 secara nasional yakni

sebesar 525.173 ton. Hal tersebut terjadi karena tingkat produktivitas Kabupaten Banyuasin tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. Produksi beras di Kabupaten Banyuasin masih bisa meningkat melihat luas panen yang dimiliki Kabupaten Banyuasin jauh lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Karawang yang menempati posisi kedua serta Kabupaten Subang yang menempati posisi ketiga. Bahkan tingkat produktivitas Kabupaten Banyuasin masih kalah jauh dibandingkan dengan Kabupaten Bone, tingkat produktivitas sendiri didapatkan dari hasil bagi jumlah produksi dengan luas panen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas yang rendah salah satunya adalah kurang produktifnya lahan pertanian karena lahan pertanian di wilayah kabupaten Banyuasin merupakan lahan pasang surut atau lahan gambut dimana dalam 1 tahun hanya bisa melakukan 1- 2 kali tanam padi. Berbeda dengan daerah Jawa yang merupakan lahan sawah yang sudah dengan sistem irigasi yang mendukung sehingga petani bisa melakukan 3 kali tanam padi dalam setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin (2020), jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyuasin sebesar 96.270 orang atau sebesar 11,17% dari total populasi penduduk Banyuasin. Jumlah tersebut tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Nasional. Wakil Bupati Banyuasin menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuasin adalah 11,17 % meski lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan yakni sebesar 12,98% lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Nasional, yakni sebesar 10,11 % (Pemerintah Kabupaten Banyuasin, 2021). Mayoritas penduduk miskin tersebut merupakan orang yang mengandalkan sektor pertanian.

Penduduk yang mengandalkan sektor pertanian sebagai pekerjaan utama selalu tertinggi di setiap tahunnya. Hal ini sungguh ironis meski sektor pertanian menyumbang pendapatan daerah yang signifikan tetapi tingkat pendapatan petani masih rendah. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ombudsman RI bahwa pendapatan 60 % petani hanya Rp.150.000 per bulan. Kegiatan pembangunan telah berhasil meningkatkan produksi pertanian namun belum mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan petani dan penanggulangan kemiskinan di pedesaan. (Chazar, 2021)

Melihat kondisi dimana tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah, Pemerintah Kabupaten Banyuasin kemudian menitikberatkan pada pengembangan pada sektor pertanian dengan melakukan upaya peningkatan produksi pertanian. Upaya peningkatan produksi pertanian tersebut dilakukan melalui Program Petani Bangkit. Program Petani Bangkit mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.

Program Petani Bangkit dicanangkan untuk diimplementasikan pada tiap kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin terutama di wilayah pedesaan. Program Petani Bangkit sendiri merupakan salah satu dari 7 (tujuh) program prioritas daerah yang diharapkan mampu mengatasi masalah pertanian terutama untuk menyejahterakan petani. Sayangnya, program ini belum mampu secara maksimal memberikan meningkatkan ekonomi petani terutama pendapatan petani. Meskipun sektor pertanian tumbuh positif di masa pandemi tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan petani. Ombudsman RI menyatakan dalam CNN Indonesia bahwa pendapatan 60 % petani hanya Rp.150.000 per bulan sehingga menyebabkan masih banyak petani masih hidup dalam garis kemiskinan (Magdalena, 2021)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dibalik pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses Implementasi program petani bangkit guna meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Banyuasin., yang pertama terkait

dengan penggunaan lahan yang belum optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan lahan tidur yang ada.

Selanjutnya adalah Sarana dan prasarana belum optimal, dalam hal ini sarana dan prasarana dalam program petani bangkit terdiri dari alat dan mesin, jaringan irigasi, pupuk dan akses jalan. Pertama, kurangnya jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Banyuasin disebabkan karena rusaknya jaringan irigasi yang ada dan kurangnya pembangunan irigasi yang baru. Kedua, mahalnya harga pupuk non subsidi membuat masyarakat sangat membutuhkan pupuk bersubsidi. Ketergantungan petani pada pupuk kimia menuntut petani harus mampu menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sebagai alternatif. Ketiga, akses jalan yang ada di Kecamatan Muara Sugihan masih kurang baik karena jalan masih tanah sehingga pada saat musim penghujan jalan akan rusak.

Permasalahan selanjutnya adalah adanya miskomunikasi antara implementor dengan sasaran terkait penyediaan pupuk. Miskomunikasi terkait penyediaan pupuk terjadinya pada saat pengisian Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengimplementasian kebijakan maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Penelitian Dhani Chairani berjudul *Implementasi Program Tanggerang Berkebun di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah* (Dhani Chairani, 2018), menemukan bahwa Implementasi Program Tanggerang Berkebun sudah berjalan sesuai rencana tetapi terlaksana kurang maksimal karena 2 (dua) faktor, yaitu: belum adanya koordinasi yang baik dan tidak melibatkan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Penelitian Desy Nafilah Ayuning Tyas berjudul *Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Program KRPL sudah berjalan sesuai rencana tetapi masih ada faktor penghambat yang kurang diperhatikan, yaitu: sedikitnya pemahaman anggota kelompok mengenai teknologi produksi dan kurangnya dilakukan pendampingan serta pelatihan kepada anggota KRPL (Desy Nafilah Ayuning Tyas, 2019). Penelitian Natalia Vera berjudul *Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur* penelitian ini menemukan Implementasi Program Ketahanan Pangan masih belum optimal yang disebabkan beberapa faktor, yaitu: kondisi dinas belum efektif melakukan tugasnya, kurang aktifnya lumbung pangan, toko tani belum berjalan optimal, dan petani masih menjual di tengkulak (Natalia Vera, 2020). selanjutnya Penelitian Hasanatul Rahmi dan Jumiati berkaitan dengan *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan* menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan masih belum maksimal. Hal tersebut dari adanya beberapa permasalahan yaitu lumbung pangan tidak terkelola dengan baik (Hasanatul Rahmi dan Jumiati, 2020). Berdasarkan hasil penelitian Riyan Saputra tentang *Implementasi Program Pendampingan Desa dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*, penulis menemukan bahwa Implementasi Program Pendampingan Desa berjalan kurang maksimal karena kurangnya komunikasi, sosialisasi dan sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas (Riyan Saputra, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi program petani bangkit guna meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Banyuasin yang seharusnya menggambarkan bagaimana proses

pelaksanaannya, analisis yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat Weimer dan Vining (1999), yaitu logika kebijakan, tempat kebijakan dioperasikan dan kemampuan implementor.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi program petani bangkit guna meningkatkan pendapatan petani, mengeksplor faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Banyuasin, dan Untuk mengeksplor upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Banyuasin.

II. METODE

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan Program Petani Bangkit di Kecamatan Muara Sugihan. Topik kajian difokuskan pada pembahasan dampak program ini terhadap pendapatan petani terutama hasil penjualan produk pertanian sebelum dan sesudah adanya kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis dengan melakukan wawancara. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, Kepala Bidang Penyuluhan dan SDM Pertanian Kabupaten Banyuasin, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Banyuasin, Kepala Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Banyuasin, dan Petani Subsisten. Sumber data sekunder bagi peneliti adalah Kabupaten Banyuasin dalam angka, Kecamatan Muara Sugihan dalam angka, serta data-data yang diperoleh dari Dinas Pertanian, Hortikultura dan Tanaman Pangan Kabupaten Banyuasin yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif bersifat deduktif yaitu analisis yang berdasarkan data, yang dikembangkan menjadi hipotesa. Adapun analisisnya menggunakan teori Weimer dan Vining (1999) yang menentukan tingkatan keberhasilan dari implementasi kebijakan terdapat tiga dimensi, yaitu logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori Weimer dan Vining (1999) yang menentukan tingkatan keberhasilan dari implementasi kebijakan terdapat tiga dimensi, yaitu logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

3.1. Dimensi Logika Kebijakan

Analisis mengenai logika kebijakan lebih mendalam berdasarkan kesesuaian tujuan dan sasaran dan dana.

Pada indikator kesesuaian tujuan dan sasaran program petani bangkit sendiri mempunyai tujuan yang jelas yakni meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Meningkatnya kesejahteraan petani ditandai dengan meningkatnya pendapatan petani. Kesesuaian antara tujuan dan sasaran pada program petani bangkit sudah selaras yaitu untuk meningkatkan pendapatan petani.

Selanjutnya indikator dana dalam program petani bangkit ini masih kurang dan perlu ditambah lagi terutama untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi. Diharapkan pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat menambah anggaran dalam program petani bangkit terkhusus anggaran untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi.

3.2. Dimensi Lingkungan Tempat Kebijakan Dioperasikan

Untuk mengetahui dukungan lingkungan terhadap implementasi kebijakan dapat dilihat dari indikator keadaan sosial, keadaan ekonomi, dan sarana dan prasarana.

Keadaan sosial masyarakat di Kabupaten Banyuasin sebagian besar merupakan bekerja di bidang pertanian sehingga mendukung untuk program petani bangkit. Hal tersebut juga didukung oleh observasi langsung penulis yang dilakukan di Kecamatan Muara Sugihan seperti pada gambar berikut:

Gambar 1. Petani di Muara Sugihan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Kondisi sosial sudah menunjang program petani bangkit sehingga harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Implementor Kebijakan. Dinas Pertanian diharapkan mampu memanfaatkan kondisi sosial yang sudah menunjang ini untuk peningkatan hasil produksi. Program petani bangkit ini tentunya berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat di Kecamatan Muara Sugihan karena sebagian besar merupakan petani.

Selanjutnya kondisi ekonomi petani di Kabupaten Banyuasin yang merupakan masyarakat dengan golongan menengah ke bawah.

Gambar 2. Rumah Petani di Kecamatan Muara Sugihan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Dengan adanya program petani bangkit ini sudah membantu menaikkan tingkat pendapatan petani terutama bantuan pemerintah terkait penyediaan alat dan mesin pertanian, bibit dan benih memang yang sudah disediakan dari pihak pemerintah. Namun, kondisi ekonomi petani masih kurang terkait modal pertanian sehingga para petani padi tentunya masih memerlukan bantuan modal yang digunakan untuk kebutuhan lain dalam menjalankan usaha pertanian. Sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah terkait masalah bantuan modal bagi petani padi.

Terkait keadaan geografis di Kabupaten Banyuasin adalah mayoritas dataran rendah yang subur sehingga sangat mendukung untuk usaha tani. Di Kecamatan Muara Sugihan kondisi geografis nya

pun seluruhnya merupakan dataran rendah, kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk bertani.

Gambar 3. Sawah di Kecamatan Muara Sugihan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Keadaan geografis yang ada di Kecamatan Muara Sugihan sudah mendukung dalam program petani bangkit sehingga keadaan ini harus dapat dimanfaatkan oleh para petani. Para petani diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang sudah mendukung ini untuk meningkatkan produktivitas, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pemerintah Daerah juga bisa memaksimalkan keadaan geografis ini untuk memberdayakan petani untuk memperoleh hasil produksi pertanian yang maksimal dan bermutu sehingga pendapatan petani juga mengalami peningkatan.

Salah satu Visi Kabupaten Banyuasin yakni meningkatkan pendapatan petani, dalam meningkatkan pendapatan petani tentunya diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana pengembangan pertanian. Sarana dan prasarana tersebut adalah sarana berupa alat dan mesin pengembangan pertanian serta prasarana berupa pupuk, jaringan irigasi dan jalan. Adapun alat dan mesin pertanian dari tahun 2018-2021 dapat dilihat pada **tabel 1**.

No	Jenis Alat	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Combine Harvester Besar	-	5	6	2
2	Combine Harvester Sedang	-	1	2	-
3	Combine Harvester Sedang	-	-	-	-
4	Combine Harvester Multiguna Besar	-	-	-	10
5	Power Thresher	-	-	2	21
6	Power Thresher Multiguna	-	-	-	10
7	Power Thresher Multiguna Mobile	-	-	5	4
8	Vertical Dryer 6 Ton	-	2	-	-
9	Vertikal Dryer 10 Ton	2	3	-	-
10	Packing	-	3	-	1
11	RMU	-	2	-	2
12	Corn Sheller	-	-	4	14
13	Corn Combine Harvester	-	2	-	-
Jumlah		2	18	19	69

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, 2022

Akses jalan yang dilalui untuk ke kota sangat susah karena kondisi jalan yang rusak dan sulit untuk dilalui pada saat musim penghujan. Terdapat akses lain melalui sungai tetapi biaya yang dibutuhkan jauh lebih besar sehingga petani lebih memilih melalui jalur darat. Hal ini yang menyebabkan petani terlambat dalam pengantaran hasil ke kota.

Gambar 4. Kondisi Akses Jalan di Kecamatan Muara Sugihan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Implementasi program petani bangkit sudah dapat meningkatkan pendapatan petani melalui bantuan sarana dan prasarana. Tetapi, pemerintah perlu menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi setiap tahunnya, menambah alat dan mesin pengembangan pertanian yang dibutuhkan oleh petani serta perlu dengan segera memperbaiki jalan yang rusak agar dapat dilalui tanpa ada hambatan sehingga proses distribusi pupuk, benih serta hasil panen dapat tepat waktu dan lebih murah dan meningkatkan pendapatan masyarakat petani.

3.3. Dimensi Kemampuan Implementor Kebijakan

Kemampuan implementor kebijakan yang dimaksud terdiri dari keterampilan implementor, kuantitas implementor dan komitmen implementor.

Pada indikator keterampilan implementor dapat dilihat berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Banyuwasin, dari 186 pegawai yang menangani penunjang urusan pertanian, terdapat sekitar 76,66% yang berlatar belakang pendidikan yang linear dengan pertanian. Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa para implementor yang menangani urusan pertanian memiliki latar belakang pendidikan yang linear dengan urusan yang ditanganinya. Para penyuluh pertanian berasal dari latar belakang pendidikan sarjana pertanian. Sehingga keterampilan implementor kebijakan pertanian dianggap sudah kompeten mengingat latar belakang pendidikan implementor yang sesuai dengan urusan yang ditangani.

Berdasarkan data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa keterampilan implementor dalam pelaksanaan petani bangkit cukup baik, terutama untuk tingkat pendidikan penyuluh yang rata-rata merupakan lulusan S1. Namun, perlu ditingkatkan lagi keterampilannya karena belum ada satu pun lulusan S3. Diharapkan ke depannya ada lulusan S3 yang bertindak sebagai implementor kebijakan sehingga dapat membawa pertanian Kabupaten Banyuwasin lebih baik lagi.

Selanjutnya indikator kuantitas implementor dapat dilihat pada pelaksana program petani bangkit yang merupakan pegawai dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terdiri dari Jumlah PNS yang berjumlah 53 orang, THL yang berjumlah 102 orang, Korlap yang berjumlah 19 orang dan Penyuluh Pertanian Lapangan yang berjumlah 97 orang tenaga Penyuluh Pertanian dan Perikanan dengan kualifikasi Ahli dan 33 orang Penyuluh THL-TBP dari 171 orang Penyuluh Pertanian dan Perikanan PNS yang ada di Kabupaten Banyuwasin.

kuantitas implementor dalam pelaksanaan petani bangkit masih kurang terutama untuk penyuluh, karena jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwasin lebih banyak dibanding dengan jumlah penyuluh PNS yang ada.

Dan pada Indikator kuantitas implementor sikap pelaksana baik pegawai atau masyarakat mendukung adanya kebijakan program petani bangkit namun belum memberikan kontribusi secara maksimal karena masyarakat masih mengeluhkan masalah penyediaan pupuk bersubsidi.

3.4. Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Program Petani Bangkit di Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin

Pelaksanaan suatu program agar mencapai tujuan yang maksimal tentu membutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada. Adapaun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat pada **tabel 2**.

No.	Hambatan	Upaya Pemerintah Daerah	Program / Kegiatan	Tahun
1.	Alih Fungsi Lahan	Dinas Pertanian melalui tenaga penyuluh perlu melakukan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan tidur	Program Peningkatan Kualitas SDM Petani melalui sosialisasi dan penyuluhan	2018-2019
2.	Sarana dan Prasarana			
	a. Ketersediaan Pupuk	Dinas Pertanian perlu bekerjasama dengan PT. Pusri untuk menjamin ketersediaan pupuk. Dinas Pertanian melalui Penyuluh juga perlu melakukan pelatihan kepada para petani terkait dengan pemanfaatan pupuk buatan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan melalui penyediaan stok pupuk dan Program Peningkatan Kualitas SDM Petani melalui pelatihan	2018-2023
	b. Alat dan Mesin	Meningkatkan Pengadaan Jumlah Alat dan Mesin Pertanian Serta Pemeliharaannya	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan melalui penyediaan alat dan mesin pertanian	2018-2019
	c. Jaringan Irigasi	Dinas Pertanian bekerjasama dengan Dinas PUPR dalam membangun jaringan irigasi	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan melalui pengolahan lahan dan air.	2020-2022
	d. Jalan	Pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerjasama dengan Dinas PUPR untuk pembangunan Jalan	Program Infrastruktur Bagus	2018-2023

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin dalam Renstra 2018-2023 diolah oleh penulis, 2022

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi program petani bangkit memberikan dampak positif untuk para petani dalam memberikan kesejahteraan terutama dalam peningkatan pendapatan. Program pertanian ini bisa dijadikan role model bagi wilayah-wilayah yang ada di Pulau Sumatera. Temuan di lapangan bahwasanya dengan program pertanian ini memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat begitupun dengan temuan (Hasanatul Rahmi dan Jumiati, 2020).

Layaknya kebijakan atau program lainnya, program petani bangkit di Kabupaten Banyuasin masih memiliki kekurangan, diantaranya miskomunikasi antara implementor dengan petani. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat. Sama halnya dengan temuan dari Dhani bahwa belum adanya koordinasi yang baik dan tidak melibatkan masyarakat yang berprofesi sebagai petani (Dhani Chairani, 2018). Begitupun dengan temuan Riyan Saputra mengenai Implementasi program pertanian yang berjalan kurang maksimal karena kurangnya komunikasi, sosialisasi dan sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas (Riyan Saputra, 2021).

Selanjutnya dengan kesiapan dinas dalam melaksanakan kebijakan belum maksimal terkait dengan ketersediaan pupuk, penggunaan lahan yang belum optimal dan sarana prasarana masih kurang. Sama halnya dengan temuan Natalia Vera mengenai belum optimal terkait dengan kondisi dinas belum efektif melakukan tugasnya, kurang aktifnya lumbung pangan, toko tani belum berjalan optimal, dan petani masih menjual di tengkulak (Natalia Vera, 2020).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Petani Bangkit dalam meningkatkan pendapatan petani di Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin ini menurut Konsep Implementasi Kebijakan Weimer dan Vining (1999) sudah berjalan sesuai prosedur namun belum optimal, dan pelaksanaan kebijakan ini telah memberikan dampak baik dalam meningkatkan pendapatan petani yang merupakan tujuan dari pelaksanaan kebijakan ini. Adapun hambatan dalam pelaksanaan program petani bangkit di Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin yakni masih belum optimal sarana dan prasarana pengembangan pertanian dan ketersediaan pupuk bersubsidi belum terjamin dan adanya miskomunikasi antara implementor dengan petani. Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mengatasi hambatan pada implementasi kebijakan Program petani bangkit dinilai belum optimal. Sejauh ini upaya yang dilakukan baru sebatas sosialisasi dan evaluasi, serta pengawasan dalam pelaksanaan program petani bangkit tersebut. Sedangkan bila dilihat dari faktor penghambat pada implementasi program petani bangkit ini, dibutuhkan upaya lebih untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan ini yakni adanya perbaikan langsung terhadap masyarakat maupun sarana dan prasarana pengembangan pertanian, serta peningkatan pada sistem pengawasan terhadap aparat pemerintah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah ditempuh sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Weimer dan Vining.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian mengenai kebijakan pengembangan pertanian di wilayah lain untuk melihat implementasi kebijakan yang sama di lokasi berbeda;

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hanamunika, G., Silvy Sari, D., & Meisa Dai, R. (2020). Implementasi Kebijakan Pengadaan. Universitas Padjadjaran.
- Mayalibit, N. F., Suwanto, S., Rusdiyana, E., & Wijianto, A. (2018). Sikap Petani Padi Terhadap Benih Unggul Padi Bersertifikat Di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*.
- Surmaini, E., & Runtuwu, E. (2015). Upaya sektor Pertanian dalam Menghadapi Perubahan Iklim. Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.
- Ubur, H. (2012). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*.
- Wahyudin, D. (2019). Analisis Penetapan Harga Kakao Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Weimer, David; Vining, A. (2010). *Policy Analysis*. Pearson Education
- <https://republika.co.id/berita//qr2mze423/inilah-25-kabupaten-produsen-beras-terbesar-indonesia-2020>
- <https://banyuasinkab.bps.go.id/indicator/23/53/1/indikator-kemiskinan.html>
- <https://banyuasinkab.go.id/2021/07/rapat-tkpk-banyuasin-pengangguran-alami-peningkatan/>
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- <https://www.bps.go.id/indicator/53/1498/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>
- <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2021.html>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210324161356-92-621592/ombudsman-pendapatan-60-persen-petani-cuma-rp150-ribu>
- <https://rri.co.id/ekonomi/977916/sector-pertanian-tumbuh-tapi-petani-masih-miskin>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210403/9/1376144/pertanian-sumbang-pertumbuhan-ekonomi-terbesar-kedua-tapi-masih-terkendala>